

# **SKRIPSI**

## **EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA**



**OLEH  
AHMAD RIZALDY  
B 11110170**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## **HALAMAN JUDUL**

# **EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum Pidana

disusun dan diajukan oleh

**AHMAD RIZALDY**  
Nomor Pokok : B 11110170

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA**

disusun dan diajukan oleh


**AHMAD RIZALDY  
B 11110170**

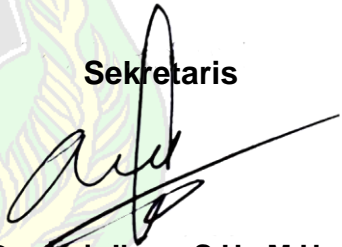
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.**  
NIP. 19620711 198703 1 001

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

### **Persetujuan Pembimbing**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD RIZALDY

Nomor Pokok : B 11110170

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam  
Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten  
Gowa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Oktober 2015

Pembimbing I



**Prof. DR. H.M. Said Karim, SH., MH., M.Si.**  
NIP. 19620711 198703 1001

Pembimbing II



**Dr. Amir Ilyas, SH., MH.**  
Nip. 19800710 200604 1001

## PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AHMAD RIZALDY**

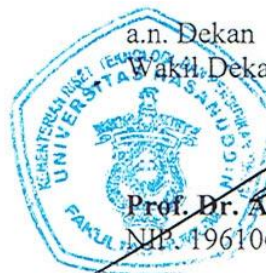
No. Pokok : B111 10 170

B a g i a n : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016



a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**

NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**Ahmad Rizaldy ( B 11110170), Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH., M.si. sebagai pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. Sebagai pembimbing II.**

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum.

Kebijakan hokum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu, bentuk-bentuk tindak pidana Pemilu dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis (*library research*), yaitu mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan, ditemukan bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Indonesia diantaranya merupakan tindak pidana. Pengaturan hokum mengenai tindak pidana Pemilu ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana Pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak Pidana yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 231 beserta segala kualifikasinya.

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim,

Puji Syukur penulis persembahkan hanya kepaa Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk serta bimbingannya sehingga penulis memiliki kemampuan merampungkan penulisan skripsi ini sesuai tahapan yang sudah direncanakan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir studinya guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hj. Farida Patintingi, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. selaku Pembimbing I Dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi yang Telah Meluangkan Waktu untuk Memberikan Masukan, Bimbingan, dan Motivasi yang Membangun Kepada Penulis Hingga Skripsi ini Terselesaikan dengan Baik.
4. Skripsi ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orang tuaku Bapak dan Ibu yang Sangat Saya Cintai dan Hormati yang Tak Henti - Hentinya Memberikan Dukungan, Doa, Nasehat, dan Motivasi Hingga sampai Detik ini Penulis Tetap Kuat dan Bersemangat dalam Menyelesaikan Studi. Gelar Sarjana Hukum ini.

5. Serta Seluruh Pihak yang Ikut Membantu, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Penulis Hanya Bisa Berdoa, Semoga Allah Membalas Kebaikan - kebaikan Mereka Dengan Setimpal. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

***Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, Februari 2016

**Penulis,**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Pengertian .....	10
B. Pengertian Tindak Pidana .....	17
C. Pidana Pemilu .....	21
D. Tugas dan Wewenang Pihak yang Terlibat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu .....	
E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra (Gakkumdu)....	45
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b> .....	48
A. Lokasi Penelitian .....	48
B. Jenis dan Sumber Data .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Analisis Data .....	50
E. Waktu Penelitian .....	51

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum.....	52
B. Implementasi UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD .....	65
C. Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu .....	79
1. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Dalam UU No.8 Tahun 2012 .....	79
2. Kedudukan Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tidak Pidana Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa.	89
3. Sistem Peradilan Terhadap Tidak Pidana Pemilu.....	93
4. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2012 .....	99
5. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu .....	100
6. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilu .....	102
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>116</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Tindak Pidana Pemilu Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 .....	80
2. Tabel Laporan / Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kabupaten Gowa Tahun 2014 .....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi.

Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik Pusat maupun Daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama Reformasi di bidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan

kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar

Makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi –fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip

keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik

pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana bagi pelakunya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2013 telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), payung hukumnya adalah kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Keanggotaan Sentra

Gakkumdu di tingkat pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu. Di tingkat provinsi terdiri dari Direktur Reskrim/Umum, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota anggotanya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Seksi Pidana Umum dan Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang amat penting demi mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil (*free and fair election*).

Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan / atau calon anggota legislative, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada berbagai level dan tingkatannya.

Pada pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta Pemilu yang menyebabkan tertundanya tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut, pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) tentu saja memiliki peran penting dalam



proses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang terjadi..

Menurut ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelanggaran pemilu dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni pelanggaran yang bersifat administratif, sengketa, dan tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana pemilu, penanganannya dilakukan oleh Panwas dengan tim yang dikenal sebagai Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang terdiri dari beberapa unsur penegak hukum yang bergabung di dalamnya, yakni, Kejaksaan, Kepolisian dan Panwas sendiri.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang cukup drastis di dalam Undang-Undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjaranya.

Agar tercipta kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan, serta mekanisme pertanggung jawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyempurnaan aturan main serta sistem yang lebih sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat Indonesia dengan keberagamannya. Bahkan bila dipandang perlu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjadi landasar penyelenggaraan Pemilu pun dapat direvisi guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mekanisme dan sistem peradilan pidana. Penyelesaian diluar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika dilihat dari proses penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat pengadilan. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan dari ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan Pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kasus-kasus itu dapat kita lihat dan jumpai pada saat atau setelah berlangsungnya pemilihan umum legislatif 2014

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa.***

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sejauh mana peraturan perundang undangan mengatur tindak pidana pemilu pada Pemilu legislatif di Kabupaten Gowa ?.
2. Bagaimana system dan kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang Pemilu?
3. Bagaimana efektifitas penanganan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang jujur dan adil ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem dan mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilu legislatif tahun 2014 khususnya di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui modus dan jenis tindak pidana yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum pidana pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan pada pelaku tindak pidana pemilu serta pihak penegak hukum terkait di Kabupaten Gowa, seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) , Kepolisian dan Kejaksaan
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum ditengah- tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian**

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Untuk lebih memahami tentang pemilihan umum legislatif serta tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu maka seyogyanya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari pemilihan umum, komisi pemilihan umum (KPU), tindak pidana dan tindak pidana pemilu.

#### **1) Pemilihan Umum (Pemilu)**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian menurut para ahli :

- a. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Menurut Harris G Warren dan kawan – kawan, pemilu merupakan :

*“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”*

c. Menurut Ali Moertopo, pengertian pemilu sebagai berikut :

“Pada hakikatnya, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaksud dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

d. Menurut Suryo Untoro “Bahwa pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).”

e. Menurut Paimin Napitupulu, Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses pemilihan sebagian rakyat pemimpin pemerintah.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan “Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD” adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggota legislatif yang terpilih melalui pemilihan umum, memiliki tanggung jawab selaku pemegang mandat rakyat untuk memperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat dalam pembangunan nasional.

Setelah uraian pengertiannya maka dapat di ketahui bahwa Pemilihan Umum adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

## **2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang mandiri dalam arti tidak dibawah kekuasaan lembaga negara yang lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU memegang peranan penting sebagai suatu penyelenggara demokrasi bagi Rakyat. Karena itu untuk menyelenggarakan Pemilu, tidak perlu lagi pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya, kecuali yang bersifat administratif untuk memperlancar kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih ditangan pemerintah.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ketentuan mengenai pemilihan umum dalam UUD 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam pasal 22 E UUD 1945 yakni sebagai berikut:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Periseden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- 4) Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

KPU menyelenggarakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perundang-undangan sesuai dengan tahapan yang benar pada proses penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan mengenai tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yakni meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas dan wewenang KPU tersebut sebagian didelegasikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai ke jenjang penyelenggara paling depan yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

### **3) Tindak Pidana Pemilu**

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang tindak pidana pemilu, terlebih dahulu perlu penulis uraikan pada bagian ini tentang pengertian tindak pidana.

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya <sup>1</sup>

- a. Perbuatan jahat sebagai eksese/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*) ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang, Yayasan Sudarto), 1990, hlm.38

memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dari perbuatan jahat dalam arti kriminologi.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) perbuatan ini terwujud dalam arti in *abstracto* dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.

Instrumen hukum ( pidana ) secara efektif dilaksanakan dengan *law enforcement* atau penegakan hukum merupakan antisipasi atas kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal istilah –istilah yang dipergunakan didalam bahasa Indonesia antara lain:

1. peristiwa pidana
2. perbuatan pidana
3. tindak Pidana
4. pelanggaran pidana.

Dari beberapa istilah diatas yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah tindak pidana. Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain. Para pakar hukm pidana asing menggunakan istilah Tindak pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, yang berarti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3.. *Feit* diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, berikut penulis kemukakan beberapa pandangan pakar hukum pidana antara lain, **R. Tresna** yang menjelaskan bahwa :<sup>2</sup>

*Strafbaar feit* atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

J.E Jonkers menyebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. 2010. Bandung. Hlm.10

1. *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat dancam pidana undang-undang;
2. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengertian tindak pidana, menurut Wirjono Projodikoro<sup>3</sup>, Tindak pidana atau dalam Bahasa *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum pidana(selanjutnya disebut KUHPidana), yang sekaang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang perbuatannya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana demikian pula dikemukakan oleh Tresna sebagai berikut : <sup>4</sup>

*Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap mana diadakan tindakan pidanaan.*

---

<sup>3</sup> Wirjono Projodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm.59.

<sup>4</sup> Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI). Makassar. Hlm. 53

Menurut batasan pengertian diatas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang perbuatannya diancam pidana. Lanjut, Simons mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab “:

menurut Van Hamel<sup>5</sup> pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang –undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa dan kelalaian (*cupa late*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*. Dalam hal tindak pidana yang dimaksudkan lebih mendekati tindak pidana pada saat berlangsungnya suatu pemilihan umum ataupun setelah diselenggarakannya pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif.

## **B. Pidana pemilu**

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang- undang warisan dari



masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.<sup>5</sup> Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.<sup>6</sup>

Rumusan atau definisi tindak pidana pemilu baik dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan definisi dalam ketentuan – ketentuan umum dibagian awal (misalnya dalam Pasal 1).

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso,<sup>7</sup> tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, Hlm.11

<sup>6</sup> Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Disertasi*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm.71

<sup>7</sup> Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta 1987, Hlm.148

menghalang- halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang –undang. Definisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya. Meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso, memberikan definisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi :

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (misalnya dalam Undang –undang Partai Politik ataupun didalam KUHP)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan kekerasan, perusakan) dan sebagainya

Pengertian pertama merupakan definisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur

dalam undang – undang pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan mudah mencari tindak pidana pemilu yaitu d dalam Undang-undang Pemilu.

Berkenan dengan masalah tersebut maka Dedi mulyadi<sup>8</sup> melakukan *redefenisi* tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu maupun dalam Undang –undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

### **C. Tugas dan Wewenang Pihak Yang Terlibat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

#### **1. Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)**

Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan secara benar. Adil, dan konsisten sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta 2012, Gramata Publishing, Hlm. 418

prosedur hukum yang berlaku. Memantau apakah benar diberlakukannya

Hukum pada saat terdapat tindak pidana pemilu atau tidak. Menurut undang –undang Nomor 8 tahun 2012 disebutkan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing – masing pengertiannya terdapat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD :

- 1) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Badan Pengawas Pemilu provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
- 3) Panitia Pengawas Pemilu kabupate/kota, selnjutnya disebut panwaslu kabupaten / kota selanjutnya disebut Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten / kota

- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dikecamatan atau nama lain.
- 5) Pengawas pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- 6) Pengawas pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu luar negeri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas yang diberikan itu berbeda – beda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008 tentang mekanisme pengawasan pemilu, yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan yang mengkaji, mengamati, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai perundang-undangan sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung, bebas rahasia jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD secara menyeluruh<sup>9</sup> sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yakni:

**a) Bawaslu**

**1. Tugas**

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah provinsi yang meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan pendataan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur
4. Penetapan calon gubernur
5. Pelaksanaan kampanye
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu

---

<sup>9</sup> Badan Pengawas Pemilu, *Peraturan BAWASLU Nomor 4 Tahun 2008*, Pasal 3

8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara wilayah kerjanya;
  9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh bawaslu dan ANRI.
  - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang –undangan mengenai pemilu;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang ;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat provinsi;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang –undang.

## 2. Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) huruf f; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsure tindak pidana.



## **b) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi**

### **1. Tugas:**

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan calon gubernur
4. Penetapan calon gubernur
5. Pelaksanaan kampanye
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan

11. Proses penetapan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun olehawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi yang disusun olehawaslu dan ANRI;
  - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang –undangan mengenai pemilu;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi
  - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung;

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

### 3. Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan lapaoran terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

### **c) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota**

#### 1. Tugas :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/kota yang meliputi :
  - 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  - 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  - 4. Penetapan calon bupati/walikota
  - 5. Pelaksanaan kampanye

6. Pengadaan logistik dan pendistribusiannya
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu
  8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  12. Proses penetapan hasil pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan pemilihan bupati/walikota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang –undangan mengenai pemilu; menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur tindak pidana;
  - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindak lanjuti;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
  - e. Menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi bawaslu yang berkaitan dengan

adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota

- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten /Kota, sekretaris dan pegawai KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu yang sedang berlangsung
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

2. Wewenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g;
- b. Memberikan rekomendai kepada yang berenang atas temuan dan laporan terhadaptindakan yang mengandung unsure tindak pidana pemilu

**d) Panitia Pengawas Kecamatan**

1. Tugas

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bupati/ walikota;
  3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecamatan dan calon bupati/walikota;
  4. penetapan calon bupati/walikota
  5. pelaksanaan kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kecamatan;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  12. proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecamatan dan pemilihan bupati /walikota;

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsure tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/ kota untuk ditindak lanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penganan sanksi kepada anggota KPU kecamatan, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kecamatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung ;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

## 2. Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsure tindak pidana pemilu.

### **e) Pengawasan Pemilu Lapangan**

#### 1. Tugas dan wewenang

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan yang meliputi :
  1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. pelaksanaan kampanye;
  3. perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
  4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. Pengumuman hasil pemungutan suara TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS;
  7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;



8. pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPS dan KPP untuk ditindak lanjuti
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsure tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang –undangan
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.

**f) Pengawas Pemilu Luar Negeri**

**1. Tugas dan Wewenang :**

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diluar negeri yang meliputi:

- 1..pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, datar pemilih hasil pelaksanaan kampanye;
  2. Pelaksanaan kampanye;
  3. perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
  - 4 .pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPLSN;
  5. pengumuman hasil pemungutan suara di setiap TPLSN
  6. pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPLSN
  7. pergerakan surat suara dari TPLSN sampai ke PPLN
  8. pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Meneruskan temuan dan lapaoran dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang.
  - d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk di tindak lanjuti
  - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas

temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.

Setelah diuraikan diatas tentang tugas dan wewenang bawaslu beserta Panwaslu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu sehingga panwaslu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang. Sangat minim apabila pemilihan umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, pasti akan terdapat pelanggaran didalamnya seperti adanya tindak pidana yang membuat panwaslu untuk lebih aktif lagi terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif ini. Tujuan dan maksud dibentuknya panwaslu ini lebih tepatnya untuk menjamin pemilu yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan pemilu legislative yang berkualitas.

## **2 . Tugas dan wewenang Kepolisian**

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas. Jujur dan adil jelas

merupakan indikator Negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya. Untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang – undang.

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan penyimpangan, hingga yang memiliki unsure pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini keamanan pada saat pemilihan umum legislative berlangsung. Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul mendapat laporan dari bawaslu atau panwaslu Provinsi, atau panwaslu kabupaten/kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya, maka bawaslu, panwaslu kabupaten kota tidak melimpahkan masalah ini kepada Kejaksaan.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak pidana pemilihan umum legislatif yakni:

- a. Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan lancar ;
- b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu atau Panwaslu kabupaten/kota.
- c. Melakukan tugas lain menurut atauran perundang-undangan yang berlaku

Dalam system peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara – perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, kendati polisi modern menjadi bagian dari birokrasi itu sendiri, dan karena tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namun pada waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang bersifat spontan.

Disinilah akan tampak betapa polisi terombang –ambing oleh dua tuntutan, yaitu di satu pihak di ikat oleh prosedur formal, sedangkan dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas memelihara ketertiban dengan baik. Pada waktu bergerak ditengah –tengah masyarakat , polisi harus memberikan penafsirannya sendiri terhadap ketentuan –ketentuan yang ada sehingga dapat dipakai dalam praktik. Untuk menghadapi kasus-kasus tindak pidana pemilu, polisi juga melakukan persiapan antara lain dengan membentuk penyidik khusus.

Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang-undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu<sup>10</sup>.

### **3 . Tugas Dan Wewenang Kejaksaan**

Selain tugas dan wewenang dari Bawaslu, Panwaslu dan kepolisian selanjutnya kita meninjau tugas dan wewenang dari kejaksaan sebagai suatu instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak pidana pemilu. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana dan undang – Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang –Undang pemilu,

---

<sup>10</sup> Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, Hlm.106

maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah melakukan penuntutan ke pengadilan<sup>11</sup>.

Adapun tugas dan wewenang kejaksaan bagian pidana yakni:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah kasus itu dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat bukti yang sah dengan aturan hukum pidana. Dari segi politik hukum , sejak didalam KUHP,para pembuat Undang-Undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>12</sup> Tuntutan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.111

yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan, karena pada hakekatnya tindak pemilu kelihatannya kecil tetapi pengaruhnya yang besar.

#### **D . Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu )**

Setelah diuraikan mengenai tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana pemilu, kemudian proses yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu lebih singkat dibanding tindak pidana pada umumnya. Proses yang terlalu lama antara pihak kepolisian dan kejaksaan yang akan jangka waktu semakin lama.

Oleh karena itu dalam Undang –Undang ini juga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.<sup>13</sup> Didalam kesepakatan tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, panwaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dinggap panwaslu adalah

---

13 Ibid, hlm.221



pelanggaran yang mengandung unsure pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu bersama pihak kepolisian.

Dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD dijelaskan terkait adanya pelanggaran pidana dalam pemilu, pidana dalam pemilu yang termasuk dalam kategori *lex specialis* tersebut, menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu.Bawaslu Kepolisian, dan kejaksaan.sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut maka dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu(Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga Negara yaitu Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu sesuai dengan dengan amat dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Berdasarkan ayat selanjutnya, dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan ayat selanjutnya, dari Undang-undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan dasar tersebut maka dibuat nota kesepahaman untuk membentuk sentra penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemiliha umum. Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, dimana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap

proses penanganan pelanggaran pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana pemilu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis guna menunjang data adalah Kabupaten Gowa dengan sasaran penelitian :

1. Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwaslu) Kabupaten Gowa
2. Kepolisian Resort (Polres) Gowa.
3. Kejaksaan Negeri Gowa.
4. Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Alasan penulis memilih keempat lembaga tersebut dikarenakan keempat lembaga tersebut berwenang dan berkompeten menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Gowa. Dan juga penulis akan mencari tempat yang menyediakan bahan pustaka seperti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan, serta di beberapa toko buku di wilayah Kota Makassar.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari hasil wawancara langsung terkait dengan penulisan skripsi, seperti Panwaslu Kabupaten Gowa, Polres Gowa, Kejaksaan Negeri Gowa, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data

dari berbagai literature yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan.

- b. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini, melakukan teknik *interview* (wawancara) yakni peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh data yang akurat terkait dengan materi pembahasan.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, seperti Ketua Panwaslu Kabupaten Gowa, Kepolisian Resor Gowa, Kejaksaan Negeri Gowa, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu Panwaslu, Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

## **D. Analisis Data**

Untuk mengolah data primer dan sekunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang

terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisa yang dikenal dengan analisis *Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat, serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **E. Waktu Penelitian**

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat, maka penulis berencana akan melakukan penelitian mulai bulan Agustus 2015 sampai September 2015.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian pada empat lembaga atau instansi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 yakni, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gowa, Kepolisian Resort (Polres) Gowa, Kejaksaan Negeri Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa.

#### **1. Lokasi Penelitian**

##### **1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa**

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gowa berada di Jalan A. Mallombassarang No.72 Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, Panwaslu Kabupaten Gowa yang beranggotakan 3 (tiga) orang, dibantu oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang juga beranggotakan masing-masing 3 (tiga) orang di setiap Kecamatan.

Struktur organisasi Panwas Kabupaten Gowa terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota dan dua orang anggota dengan tiga bidang tugas atau divisi masing-masing Divisi Keorganisasian dan Sumber Daya Manusia, Divisi Pendidikan dan Penanganan Pelanggaran serta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Dalam pelaksanaan tugas selama berlangsungnya tahapan Pemilu, Panwaslu ditunjang oleh perangkat sekretariat yang terdiri dari seorang kepala yang membawahi staf sekretariat yang membantu pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan di tiap-tiap divisi.

Panwaslu Kabupaten Gowa membawahi Panwaslu di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, masing-masing sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan Bontonompo
2. Panwaslu Kecamatan Bajeng
3. Panwaslu Kecamatan Tompobulu
4. Panwaslu Kecamatan Tinggimoncong
5. Panwaslu Kecamatan Parangloe
6. Panwaslu Kecamatan Bontomarannu
7. Panwaslu Kecamatan Pallangga
8. Panwaslu Kecamatan Somba Opu
9. Panwaslu Kecamatan Bungaya
10. Panwaslu Kecamatan Tombolo Pao
11. Panwaslu Kecamatan Biringbulu
12. Panwaslu Kecamatan Barombong
13. Panwaslu Kecamatan Pattallassang
14. Panwaslu Kecamatan Manuju
15. Panwaslu Kecamatan Bontolempangan
16. Panwaslu Kecamatan Bontonompo Selatan



17. Panwaslu Kecamatan Parigi, dan

18. Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat.

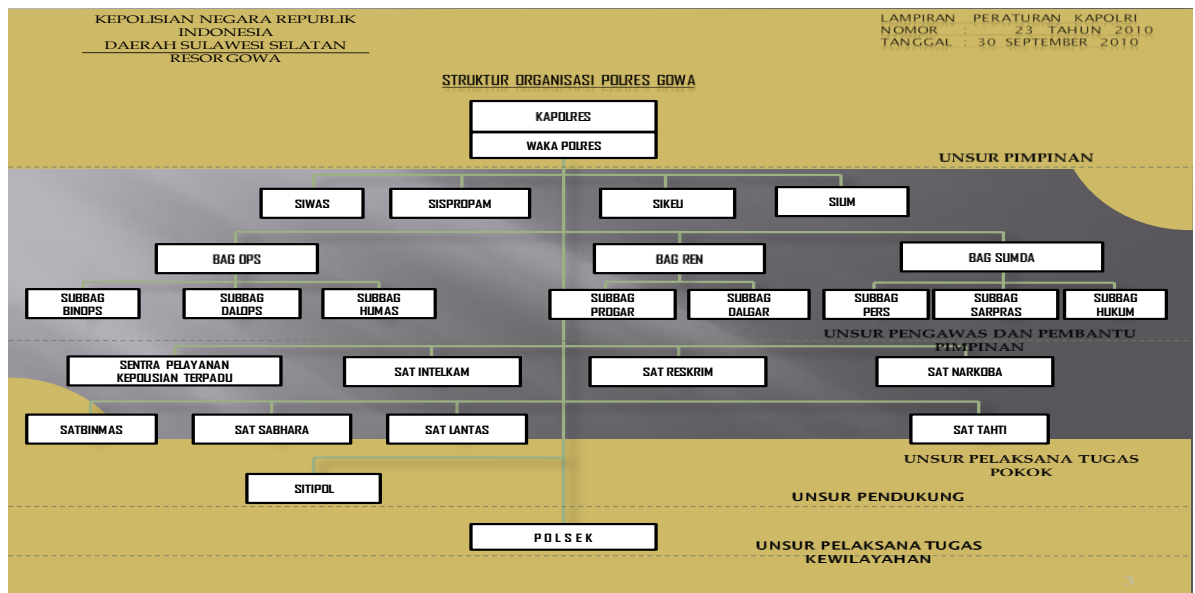
## **1.2. Kepolisian Resort Gowa**

Kepolisian Resort (Polres) Gowa, berkantor di Jalan Syamduddin Tunru, Kota Sungguminasa. Wilayah kerja Kepolisian Resort Gowa mencakup 18 Kecamatan (Bontonompo, Bajeng, Tompobulu, Tinggi Moncong, Parangloe, Bontomarannu, Pallangga, Sombaopu, Bungaya, Tombolopao, Biringbulu, Barombong, Pattallasang, Manuju, Bonto Lempangan, Bontonompo Selatan, Parigi, dan Bajeng Barat).

Susunan organisasi Kepolisian Resort (Polres) Gowa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor.

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Gowa dapat digambarkan sebagai berikut :

## Stuktur POLRES dengan 500 personil



### Struktur Organisasi Tipe Polsek

- POLSEK URBAN Somba Opu dengan 90 personil
- POSLSEK RURAL 11 sektor dengan total 550 personil
  1. Kecamatan Bontonompo
  2. Kecamatan Bajeng
  3. Kecamatan Tompobulu
  4. Kecamatan Tinggimoncong
  5. Kecamatan Parangloe
  6. Kecamatan Bontomarannu
  7. Kecamatan Pallangga
  8. Kecamatan Bungaya
  9. Kecamatan Tombolo Pao
  - 10..Kecamatan Biringbulu
  11. Kecamatan Barombong

POLSEK PRA RURAL Manuju dengan 30 personil, dan

SUB SEKTOR sebanyak 2 satuan dengan 32 personil

1. Kecamatan Bontonompo selatan, dan
2. Kecamatan Bajeng Barat

TOTAL 1202 personil

### **1.3. Kejaksaan Negeri Sungguminasa**

Kantor Kejaksaan Negeri Sungguminasa beralamat di jalan Andi Mallombassarang, Kota Sungguminasa. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Sungguminasa terdiri dari, Kepala Kejaksaan, yang membawahi KasubagBin, 5 Kepala Seksi ( Intel, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pemeriksa) serta 10 orang Jaksa Negeri Sungguminasa memiliki 5 Kepala Urusan (Kaur Kepegawaian, keuangan, Perlengkapan, Tata Usaha, dan Kaur Daskrimti).

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2012, Kejaksaan Negeri Gowa hanya menerima pelimpahan satu berkas perkara Pidana Pemilu dari Penyidik Polres Gowa. Kasus tersebut terkait dengan pengurangan perolehan suara dari salah seorang calon anggota legislatif yang dilakukan oleh salah seorang anggota PPK diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa sebagai berikut :

*Primair : Bahwa Terdakwa Alimuddin Dg. Nyonri Bin Surate pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun*

2014 bertempat di kantor KPU Kabupaten Gowa jalan Andi Mallombassang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadlinya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta tertentu mendapat tambahan suara atau memperoleh suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 april 2014 pada saat dilakukan penghitungan ulang hasil pemilu legislatif untuk daerah pemilihan I Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dimana pada saat itu Terdakwa yang bertugas selaku anggota PPK Kec. Somba Opu ketika dilakukan penghitungan ulang hasil suara Pemilu Legislatif di Kantor KPU Kabupaten Gowa, terdakwa telah memanfaatkan situasi dengan cara Terdakwa dengan sengaja telah membacakan hasil perolehan suara tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya;-----
- Bahwa tidakan Terdakwa diketahui pada saat saksi Aslan (saksi Partai Gerindra) datang di TKP saat penghitungan ulang hamper selesai, dimana saat itu Terdakwa membacakan hasil penghitungan suara ulang tersebut, saksi Aslan merasa curiga kemudian mencoba mengambil 3 (tiga) lembar surat suara yang dibacakan Terdakwa dan dari kertas suara yang diambiltersebut kemudian dibuka ternyata Terdakwa selaku anggota PPK tidak jujur kaena sengaja membacakan surat suara dari caleg No. 1 Gerindra, atas nama H. Hamli Halim, SE.,MM. dibacakan untuk calon Nomor 2 juga dari Partai Gerindra atas nama Iryani Bakri, SE., sehingga menyebabkan caleg dari Partai tertentu mendapat tambahan suara dan pengurangan suara;-----

- *Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Arief selaku Komsioner KPU Kab. Gowa memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang pada TPS.01 Kel Romang Polong, Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena adanya keberatan dari saksi dari partai Gerindra dan setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata hasilnya tidak sama dengan hasil penghitungan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa dimana caleg Nomor 1 dari Partai Gerindra atas nama H. Hamli Halim memperoleh suara kosong (0) dan setelah penghitungan kedua memperoleh suara 10 sedangkan caleg Nomor 2 dari Partai Gerindra atas nama Iryana Bakri pada penghitungan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa memperoleh suara 12 dan setelah penghitungan kedua memperoleh suara 1 dan hasil penghitungan ulang secara keseluruhan diperoleh fakta bahwa caleg dari partai Gerindra yang dirugikan juga dari caleg Partai lain yakni Nasdem, PKB, PKS, PDIP, PAN, PPP dan PKPI ada yang hasil perolehan suaranya menjadi bertambah dan ada yang berkurang ;-----*
- *Bahwa setelah kejadian itu, Tersangka selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Somba Opu Kab Gowa pada hari itu, jum'at tanggal 25 April 2014 telah di non aktifkan oleh Ketua KPU Kab. Gowa sesuai surat KPU Nomor : 26/BA/KPU.KAB.025.433280/IV/2014 ; -----*
- *Perbuatan Terdakwa Alimuddin Dg. Nyonri Bin Surate sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; -----*

Terdakwa dalam kasus tersebut divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Banding.

#### **1.4. Pengadilan Negeri Sungguminasa**

Pengadilan Negeri Sungguminasa beralamat di jalan Usman Salengke, Sungguminasa. Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki 9 (sembilan) orang Hakim yang dipimpin oleh H. Minanoer Rahman, SH.,MH. sebagai Ketua dan Muhammad Junaidi, SH.,MH. Sebagai Wakil Ketua.

Sedangkan unsur Pejabat Struktural dan Fungsional Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari :

3. Panitera / Sekretaris : Muhammad Ansar Tamar, SH.,MH.
4. Wakil Panitera : H. Burhanuddin, SH.,MH.
5. Wakil Sekretaris : Syamsu Rasbu Indra, SH.,MH.

Secara keseluruhan, operasional kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Hakim dan 5 (lima) orang Panitera/Panitera Pangganti serta 3 (tiga) orang Kepala Sub. Bagian (Kasubag).,

Berdasarkan penelitian Penulis terkait perkara pidana Pemilu Tahun 2014, Pengadilan Negeri Sungguminasa hanya mengadili dan memutus 1(satu) perkara pidana Pemilu, yakni Perkara Nomor : 108/PID.SUS/2014/PN.Sgm. atas nama Terdakwa Sunandar Dg. Tona Bin M. Leo dengan vonis 3 (tiga) bulan Penjara karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu, yaitu sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD\*.

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa dalam perkara ini adalah sebagai berikut <sup>14</sup>:

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin, SE, Dg. Nyonri Bin Surate dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “*Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*”,-----
  1. (satu) eksamplar Banko C1 plano pada TPS 01 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu Kab. Gowa;-----
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Alimuddin, SE, Dg. Nyonri Bin Surate tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah;-----
3. Menetapkan pidana denda yang dijatuhkan tersebut diganti dengan pidana kurungan penganti selama 1 (satu) bulan apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap berakhir;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa Nomor : 108/PID.SUS/2014/PN.Sgm., Tahun 2012

- 1 (satu) eksamplar Banko C1 plano pada TPS 01 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
  - 1 (satu) eksamplar Banko C1 kecil pada TPS 01 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
  - 1 (satu) rangkap surat pengangkatan Ketua PPK;
  - 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Panwas Kab. Gowa kepada KPU Kab. Gowa tentang perhitungan ulang di Kab. Gowa;
  - Hasil Rapat Pleno Komisioner KPU Kab. Gowa tentang pennon aktifan sementara terhadap PPK atas nama sdr. Alimuddin, SE, Dg. Nyonri Bin Surate; dan
  - Berita Acara perubahan hasil perhitungan suara di Kab. Gowa;
- Dikembalikan kepada pihak KPU Kab. Gowa;*
- Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan**

Masalah hukum pemilu merupakan hal yang cukup kompleks. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran pemilu juga melibatkan banyak lembaga/institusi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012



tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, setidaknya terdapat enam jenis pelanggaran hukum pemilu, yaitu : pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.<sup>15</sup>

Banyaknya jenis pelanggaran hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu : (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan (9) Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.

Realitas tersebut di atas menunjukkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu . Jangankan untuk melaksanakan, memahaminya pun butuh energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat buruk dalam pelaksanaannya. Pada gilirannya, pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena rumusan atau konten

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

aturannya maupun karena faktor penegak hukum dan budaya hukum.

Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Sekilas mungkin tampak sederhana, namun jika diselami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian, kesamaan persepsi diantara para penegak hukum, termasuk hukum acara yang menjadi acuan penegakannya yang diatur dalam berbagai undang-undang .

Salah satu langkah strategis Bawaslu yang merupakan pelaksanaan dari amanah UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah dengan menginisiasi penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tiga lembaga, yakni Bawaslu, Polri dan Kejaksaan yang intinya adalah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai forum bersama dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Selain karena amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, hal yang juga melatarbelakangi kerjasama antara tiga lembaga ini adalah pengalaman penanganan pelanggaran Pemilu yang kerap terbentur pada ketidaksamaan persepsi dalam

penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh UU Pemilu.

Tujuan dari pembentukan sentra Gakkumdu adalah untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis untuk terciptanya penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur hal yang lebih spesifik tentang waktu penyampaian laporan Pelanggaran. Jika sebelum perubahan undang-undang, batas waktu pelaporan hanya 3 hari, maka dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tenggang waktu pelaporan diatur menjadi 7 hari sejak diketahui dan/ atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran oleh jajaran Pengawas Pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan Pemilu Tahun 2009, dimana Pengawas Pemilu berkewajiban menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan tambahan keterangan dari Pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran Pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

Guna memudahkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan Jurdil, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupaya untuk menata kembali format

pelaporan sehingga lebih sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat. Selain itu, Bawaslu juga menciptakan proses dan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu yang lebih sederhana, baik dari aspek klarifikasi laporan masyarakat, maupun temuan oleh jajaran Panwas sendiri. Penataan format dan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus tersebut dituangkan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Perbawaslu ini diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas dan kredibel, serta penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, jujur dan adil.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga mengganti semua terminologi pelanggaran pidana Pemilu yang ada dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan terminology baru yang lebih konsisten dan tegas, yaitu tindak pidana Pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu.

## **B. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Tindak Pidana Pemilu**

## **1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu**

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .

Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, melalui rangkaian tahapan-tahapan program dan kegiatan yang meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang dimaksud disini beraneka ragam, mulai dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai pemilihan Kepala Desa.

Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bagian menimbang butir *a* sampai *b* menyebutkan:

- a. untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilihan Umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB (DUHAM) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih

secara bebas. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintah negerinya.

Untuk mendukung Pasal 21 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights*, dalam Pasal 21 ayat (3) ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas.<sup>16</sup>

Pada tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang

---

<sup>16</sup> Ibid., hal. 53.

berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami pengertian tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada dasarnya meliputi Pasal-Pasal yang diatur dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

## **2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014**

Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana beberapa ketentuan di dalamnya merupakan hasil perubahan dari undang-undang Pemilu sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berlaku pada Pemilu Tahun 2009.

---

<sup>17</sup> Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 89.



Untuk pembahasan dalam skripsi ini, Penulis lebih fokus pada kajian tentang ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 beserta mekanisme penegakannya, termasuk lembaga atau aparaturnya yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.

Pilihan sistem demokrasi di Indonesia, menghendaki eksistensi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum harus mendapatkan tempat tersendiri di negeri ini. Partai politik adalah prasyarat mutlak bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dan partai politik di alam demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan antara sisi yang satu dengan lainnya. Karena Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang Pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari Pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan Pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu. Kasus yang sering terjadi pada setiap Pemilu adalah kasus penggelembungan suara dan atau politik uang (money politic) atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Penggelembungan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan diantaranya dapat disebutkan disini misalnya; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan

sekaligus dengan sanksi penjara. Sedangkan dari segi cakupan terdapat perkembangan dari lima tindak pidana pemilu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 15 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Tahun 1999, melonjak menjadi 28 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004, dan terus meningkat menjadi 55 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari segi hukum acara juga terdapat perkembangan baru dalam politik hukum yaitu ditentukannya penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat, mulai dari penyidikan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di Pengadilan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok langsung selesai di tingkat Pengadilan Negeri, sedang kelompok lainnya mengenai pengadilan terakhir dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yaitu di Pengadilan Tinggi.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan,

dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum.

Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Menurut **Barda Nawawi Arief**, bahwa penuangan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, secara garis besar meliputi:

a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan terlarang apa

yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. Perencanaan dan kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Dan sesuai juga dengan amanat reformasi, lebih berkualitas.

### **3. Tindak Pidana Pemilu Dalam UU No. 8 Tahun 2012**

Ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Mengenai Pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi

Pasal-Pasal yang diatur dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 321. Perihal kepidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam UU ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.<sup>18</sup> Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan

---

<sup>18</sup> Titi Anggraini dan August Mellaz, "Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD", Perludem, 2013, Hal. 10.

keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama.
2. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu lama tidak diatur masalah sengketa pemilu sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi otoritas Bawaslu.
4. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>24</sup> Penyelesaian sengketa pemilu ini disinkronkan dengan UU No. 15 Tahun 2011, yakni diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan (Pasal 258).

Selain itu UU No. 8 Tahun 2012 mengganti semua terminologi pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam UU Pemilu yang lama dengan terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu

tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.<sup>19</sup>

Sama seperti UU Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya Majelis Khusus di Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan

---

<sup>19</sup> Ketentuan 24 Negara Hukum.com, "Tindak Pidana Pemilu", <http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 20 Maret 2013.



tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus ini akan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 266).

Banyaknya tindak pidana Pemilu, tidak menjamin penegakan hukum. Penggunaan pidana dalam proses Pemilu tidaklah mudah. Pengawas Pemilu, penyidik Polri, Jaksa dan Hakim masih berbeda persepsi terhadap beberapa bentuk kasus pidana Pemilu. Terutama ketentuan yang definisinya kabur, bisa diartikan sempit atau luas. Perdebatan definisi kampanye itu sudah menjadi perdebatan yang klasik dan terjadi dari dulu.<sup>20</sup> Atas dasar itu Topo Santoso mengusulkan agar berbagai ketentuan pidana Pemilu dibahas lebih mendalam. Sehingga dapat menghasilkan ketentuan yang lebih jelas, tidak ambigu dan mudah dipahami semua pihak. Ahli pidana berperan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan tindak pidana pemilu.

Menurut Topo ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum Pemilu. Diantaranya, harus dilihat secara materil mana pelanggaran yang perlu dikenakan pidana,

---

<sup>20</sup> Topo Santoso dalam diskusi yang digelar Perludem di Jakarta, Kamis (13/11).

administratif atau etik. Unsur-unsurnya harus dibahas lebih lanjut. Kemudian, penjatuhan sanksinya apakah penjara, denda atau alternatif (penjara dan denda). Selain itu bisa saja diperkuat dengan pidana tambahan. Misalnya, mencabut hak dipilih atau memilih dalam 10 tahun ke depan.

### **C. Tindak Pidana Pemilu dan Efektivitas Penanganannya**

#### **1. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 UU Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 292 – Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pengklasifikasian tersebut tidaklah begitu jelas maksudnya. Sebab, antara pelanggaran dan kejahatan justru tidak dapat dibedakan secara jelas. Untuk memastikan hal tersebut, berikut ini akan dipaparkan identifikasi tindak pidana pemilu, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, sebagaimana tergambar pada table dibawah ini :

**TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIATUR DALAM  
UU NOMOR 8 TAHUN 2012**

No.	Pelanggaran	No.	Kejahatan
1.	memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih	1.	orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
2.	anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu	2.	orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini
3.	mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu	3.	anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
4.	melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi,	4.	anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada

	dan Kabupaten/Kota	KPU		Partai Politik Peserta Pemilu
5.	pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan kampanye		5.	anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu
6.	pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan kampanye		6.	orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu
7.	Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa		7.	orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu
8.	Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa		8.	Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu
9.	Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan		9.	Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua

	tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu		badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan kampanye
10.	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	10.	pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
11.	anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara	11.	pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung
12.	membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain	12.	orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu
13.	anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk	13.	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU

	pemungutan suara ulang di TPS		Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
14.	anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan	14.	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
15.	orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	15.	orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan
16.	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	16.	Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
17.	anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan	17.	orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan

	salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS		dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan
18.	Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan	18.	Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
19.	Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota	19.	Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu
20.	anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya	20.	perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu
21.	orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa	21.	perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara

	Tenang		
		22.	orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara
		23.	orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang
		24.	orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih
		25.	orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel
		26.	orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
		27.	orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu
		28.	anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan



			<p>kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama</p>
		29.	<p>PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS</p>
		30.	<p>PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK</p>
		31.	<p>Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu</p>
		32.	<p>Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat</p>
		33.	<p>anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan</p>

			yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
		34.	KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2)
		35.	anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
	Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu.... pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.		

Dari 21 jenis pelanggaran dan 35 jenis kejahatan yang dikriminalisasi dalam UU Pemilu legislatif terlihat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara apa yang diatur sebagai pelanggaran dan apa yang diatur sebagai kejahatan. Sebab, pada bagian pengaturan tentang tindak pidana kejahatan juga memuat apa yang secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran. Contohnya, tindak pidana pengumuman penghitungan cepat, pidana tidak menetapkan hasil pemilu, pidana tidak menindaklanjuti

temuan/laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dan jajarannya. Ketidakjelasan perbedaan antara dua klasifikasi tindak pidana pemilu tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana pemilu sesungguhnya belum memiliki arah yang begitu jelas.

Selain itu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu yang demikian juga tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap penegakan hukum pidana pemilu. Sebab, baik pelanggaran ataupun kejahatan tetap ditangani menurut cara-cara dan hukum acara yang sama. Sehingga klasifikasi tersebut menjadi tidak begitu penting.

Dari pengalaman pengaturan tentang tindak pidana pemilu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu ke dalam : “tindak pidana ringan” dan “tindak pidana biasa” jauh lebih tepat dibanding mengklasifikasikannya seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Setidaknya, klasifikasi seperti itu akan berimplikasi pada mekanisme penanganannya. Dengan demikian, penanganan tindak pidana ringan dalam pemilu akan mengikuti hukum acara tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHAP, hal yang sama juga berlaku untuk tindak pidana biasa. Hanya saja, penanganan tindak pidana pemilu biasa tetap dengan batasan-batasan waktu yang ada, bukan mengikuti waktu penanganan perkara sebagaimana terdapat dalam KUHAP.

Dengan demikian, akan ada tindak pidana pemilu yang penanganan dapat dilakukan dengan memotong birokrasi

penanganan perkara yang panjang (pidana ringan) dan ada pula jenis tindak pidana yang mesti melalui semua tahapan penanganan perkara pidana pemilu yang konvensional (pidana biasa). Dengan jalan itu, tentunya penanganan tindak pidana pemilu akan lebih efektif.

## **2. Kedudukan Sentra Gakumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.**

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian terdahulu dari bab ini bahwa penyelenggaraan Pemilu berlangsung tahap demi tahap dimana pada setiap tahapannya terdapat ruang atau potensi terjadi tindak pidana, baik itu dilakukan oleh peserta Pemilu, anggota masyarakat pemilih bahkan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Dalam kondisi demikian, maka Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memiliki peran penting untuk mengawasi dan menangani berbagai pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi sebagai implementasi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan tentang Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu membentuk Badan

Pengawas Pemilu (Pawaslu) Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. Demikian seterusnya secara berjenjang dibentuk panitia pengawas sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

Hasil evaluasi Bawaslu RI pada tahun 2013 menunjukkan penanganan pelanggaran Pemilu kerap terbentur pada perbedaan atau ketidaksamaan persepsi diantara penegak hukum dalam penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh UU Pemilu. Hal itu pula yang menyulitkan Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu ditolak oleh Kepolisian akibat tidak cukup bukti atau karena Sentra Gakkumdu belum terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dalam penanganan tindak pidana Pemilu<sup>21</sup>.

Salah satu langkah strategis Bawaslu agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dibentuklah wadah Sentra Gakkumdu melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI.

Maksud dari nota kesepahaman antara tiga lembaga tersebut tidak sekedar untuk menyamakan pemahaman tetapi juga untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergisme dalam rangka Penegakan Hukum Terpadu serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

Mengacu pada MoU tersebut, maka proses penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 digambarkan sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu tersebut di atas dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. Pemantau Pemilu;
  - c. Peserta Pemilu .

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu

---

<sup>22</sup> Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu, Polri dan Kejaksaan, tanggal 16 Februari 2013.

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak Terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
- d. Uraian kejadian .

Laporan pelanggaran Pemilu di sampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu . Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima .

Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Jika Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor mengenai tindak lanjut penanganan laporannya maka undang-undang membatasi waktunya paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Selanjutnya, laporan

Tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Setelah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan tindak Pidana Pemilu, lalu Tindak Pidana Pemilu tersebut digelar di dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), kemudian setelah ada kesepakatan dari tim bahwa laporan tersebut merupakan Tindak Pidana pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Hasil penyidikan Kepolisian selanjutnya disampaikan kepada Penuntut Umum disertai berkas perkara paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. Jika berkas Perkara tersebut sudah dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam waktu 5 (lima) hari perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

### **3. Sistem Peradilan Terhadap Tindak Pidana Pemilu**



Sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.

Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang diatur dalam hukum pidana pemilu;

*pertama*, dari segi hukum materiil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293 UU Pemilu Legislatif), pemalsuan dokumen (298 UU Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311 UU Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam UU Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu.

Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain<sup>23</sup>. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

*Kedua*, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). dimana, Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu<sup>24</sup>. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UU Nomor 8 Tahun 2012

---

<sup>23</sup> dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta:PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, h. 618

<sup>24</sup> Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu.

Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

*Ketiga*, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu

beserta jajarannya. Apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.<sup>25</sup>

Karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, maka diatur dan dibentuklah sebuah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu), dimana institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu.

Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau tidak. Dalam konteks itu, pada kondisi tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai UU Pemilu, penyidik

---

<sup>25</sup> Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pemilu.

*Keempat*, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, dimana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setidaknya empat hal itulah yang menunjukkan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya akan digambarkan sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan Bawaslu dan jajarannya, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya. Oleh karena itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

#### **4. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu (Berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012)**

Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan Polisi, Jaksa dan Pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana dimana, keterlibatan Polisi Dan Jaksa tidak lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, Polisi dan Jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Perubahan desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur Polisi dan Jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komando, sehingga

penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

## **5. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu, dalam arti, tidak terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam proses pembuktiannya. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHAP. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 262 ayat (1) yang menyatakan, *Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.* Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.

Dengan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.

Jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana korupsi, salah satu faktor yang mendukung efektifitas penanganan tindak pidana korupsi adalah tersedianya ruang pembuktian lebih luas dibanding apa yang termuat dalam KUHAP. Salah satunya, perluasan definisi bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Sebagai contoh, dalam Pasal 26 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur sebagai berikut :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.



Ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas memberi kesempatan cukup luas bagi penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi secara lebih mudah. sebab penyidik tidak saja terbatas pada cara memperoleh alat bukti yang diatur dalam KUHAP, melainkan lebih luas dari itu.

Jika hal yang sama diterapkan dalam penanganan tindak pidana pemilu, tentunya pembuktian tindak pidana pemilu akan jauh lebih mudah karena penyidik memiliki sumber bukti yang lebih luas dari sekedar ketentuan KUHAP yang dapat dikatakan sangat terbatas. Dengan demikian, sebuah dugaan tindak pidana pemilu tidak dengan mudah lolos karena alasan tidak cukup bukti untuk membawanya ke proses pengadilan. Apalagi tindak pidana pemilu sangat mudah diselundupkan ke dalam berbagai aktifitas lainnya. Dengan berbagai cara, pelaku tindak pidana pemilu justru mudah untuk lepas dari jeratan hukum karena bukti-bukti terjadinya tindak pidana pemilu sangat sulit untuk ditemukan.

## **6. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilu**

Problem penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat disigi dengan melihat masing-masing komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. *Pertama*, substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang

berada dalam sistem itu<sup>26</sup>. *Kedua*, struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan<sup>27</sup>.

Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Berangkat dari tiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu. Masalah profesionalisme aparat penegakan Hukum Yang Terdiri Dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang jauh dari kondisi sehat.

---

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, h.. 7

<sup>27</sup> Ibid Hlm.12

Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu, belum profesional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada.

Tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu tidak dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik.

Kondisi demikian pun terjadi di Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Dari 17 laporan / temuan pelanggaran yang masuk di Panwaslu Kabupaten Gowa, hanya

satu kasus yang berlanjut penanganannya sampai ke sidang pengadilan. Selebihnya dinilai tidak memenuhi syarat/usur di tingkat penyidikan oleh Kepolisian sebagaimana tergambar pada table berikut ini :

**DATA  
LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU  
LEGISLATIF  
DI KABUPATEN GOWA 2014**

<b>NO</b>	<b>NOMOR &amp; TGL LAPORAN/TEMUAN</b>	<b>DUGAAN PELANGGARAN</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
<b>1.</b>	001/tgl 17/2/2014	Acara Sosialisasi Caleg DPRD Tk. I Partai Golkar an. Hj. Rismawati Kadir Nyampa, ST. Dan Caleg DPRD Tk. II Partai PPP an. Drs. Syarief Dg. Ngesa dihadiri oleh kedua terlapor dan menjadi orator pada acara tersebut.	Kampanye	Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu
<b>2.</b>	002/ tgl 18/2/2014	cara Sosialisasi dilakukan oleh Terlapor bersama Timnya dan semua warga yang hadir dalam acara tersebut dibagikan sarung dan stiker/gambar caleg tersebut	Kampanye	Tidak Memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu
<b>3.</b>	003/ tgl 19/2/2014	Acara Sosialisasi yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai pemberian uang kepada 2 orang warga masyarakat dalam bentuk kuis. Orang pertama yang mampu menjawab pertanyaan Terlapor diberikan Rp. 50.000,- sedangkan orang kedua diberikan Rp.	Kampanye	Tidak Memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

NO	NOMOR & TGL LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN	TINDAK LANJUT
		100.000,-		
4.	004/ tgl 15/3/2014	Terlapor melakukan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dan mensosialisasikan cara pemilihan dengan menunjukkan contoh gambar Surat Suara dan pada Surat Suara tersebut terdapat foto Dr. Hj. Kasmawati T.Z. Basalamah (Calon Anggota DPD) yang dihadiri sekitar 50 orang dan dilakukan di Teras Mesjid BTN Johor Bontolebang	Kampanye	Tidak Ditindaklanjuti karena yang bersangkutan telah didiskualifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan
5.	005/ tgl 26/3/2014	Kampanye Rapat Umum Terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Golkar di Lapangan Ex. Kertago Romang Lompoa Kec. Bontomarannu dan dihadiri oleh Saudara H. Syahbandar Awing Kepala Desa Pattallikang Kec. Manuju dengan dugaan ikut berkampanye memakai baju warna kuning	Kampanye	Kasus diklarifikasi langsung ditingkat Panwaslu kec. Manuju dan ternyata baju yang dipakai Terlapor bukan baju Golkar melainkan Baju Club Motor. Kehadirannya di lokasi kampanye untuk mende ngar dan mengetahui visi misi para caleg.
6.	Tg 26/3/2014	Kampanye Rapat Umum Terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra di Lapangan IRPAL Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang diikuti oleh Anggota KPPS (Terlapor) dengan memakai baju yang ber lambangkan Partai	Kampanye	

NO	NOMOR & TGL LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN	TINDAK LANJUT
		Gerindra seperti terlihat pada foto.		
7	Tgl 7/4/2014	Pelapor masuk ke BTN tersebut warga menyebut banyak Caleg dilarang masuk ke wilayah tersebut tapi saya mau tahu apa yang terjadi. Saya temui orang tersebut, dia mengatakan disini sudah ada 1paket caleg yang kami dukung , dan dia menyebut dirinya Ketua PPS dan Sekretaris PPS dan dia menyebut bahwa disana ada 3 TPS sekitar 1000 wajib pilih.	Masa Tenang	Tidak Memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu
8.	Tgl 9/4/2014	Pelapor hanya mendapatkan undangan C6 1 orang sementara dalam satu rumah ada 12 orang wajib pilih. Saat datang di TPS untuk mencoblos Petugas KPPS memerintahkan kepada 11 orang keluarganya yang lain untuk memfoto copy KTPnya terlebih dahulu baru diizinkan masuk.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tidak Memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu
9.	Tgl 10/4/2014	Hasil rekap C1 pada TPS 33 Desa Bontoala yang diberikan kepada saksi tidak sesuai dengan C1 Plano dan jumlah pemilih dan Petugas KPPS pada TPS 02 Mangalli tidak memberikan hasil rekap C1 kepada saksi dengan alasan C1 tidak cukup.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tidak Memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu
10	Tgl 10/4/2014	Penghitungan suara berakhir pukul 03.00 wita, saksi yang berada di TPS tinggal 2 orang yaitu saksi	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tidak Memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

NO	NOMOR & TGL LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN	TINDAK LANJUT
		saksi Gerindra dan PBB. Pada saat itu saksi tidak diberikan C1 sehingga besoknya sore hari baru diberikan tetapi foto copyan. Dalam C1 tersebut suara caleg Gerindra Nomor Urut 3 untuk DPRD II tertulis 31 padahal seharusnya 51.		
11	Tgl 11/4/2014	Petugas KPPS atas nama Salmah duduk di belakang bilik tempat pencoblosan dan setelah ada wajib pilih yang masuk ke dalam bilik dia berdiri dan seakan mengarahkan wajib pilih untuk memilih salah satu partai atau caleg.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tidak cukup unsur Pelanggaran Pidana Pemilu
12	Tgl 11/4/2014	Pada saat pencoblosan, wajib pilih yang membutuhkan pendampingan tidak diberikan formulir pendampingan. Pada saat penghitungan, surat suara yang sudah tercoblos dicoblos lagi untuk membatalkan suara kemudian pada surat suara yang lain ada yang sudah tercoblos kemudian ditutupi lalu dicoblos partai dan caleg tertentu lagi untuk memindahkan suara.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tidak cukup unsur Pelanggaran Pidana Pemilu
13	Tgl 12/4/2014	Adanya dugaan terhadap Pemilih atas nama Rostini mencoblos lebih dari 1 (satu) kali karena datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sebagai pengguna KTP/KK	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tidak cukup unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

NO	NOMOR & TGL LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN	TINDAK LANJUT
		dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT. Akan tetapi pada kenyataannya setelah Pelapor mengeceknya dalam DPT yang bersangkutan terdaftar pada TPS 10 Tombolo nomor urut dalam DPT 434		
14	Tgl 12/4/2014	Pada dini hari setelah proses rekapiutulasi penghitungan suara tingkat PPS terjadi selisih suara atas nama Andi Maddusila A. Idjo di TPS 06 Sungguminasa. Sewaktu dibacakan Petugas KPPS salah ambil C1 Plano, yang diambil C1 Plano TPS 04. Pada saat diperlihatkan dan ternyata selisih tersebut diakibatkan oleh salah ambil C1 Plano tersebut tiba-tiba C1 Plano diambil oleh Terlapor dengan alasan sebagai barang bukti karena menganggap C1 Plano tersebut ganda. Beberapa kali petugas KPPS meminta kembali akan tetapi tidak diberikan bahkan sempat saling tarik-menarik.	Rekapitulasi Perolehan Suara	Laporan kembali Pelapor ditarik oleh
15	Tgl 12/4/2014	Di Kantor Lurah Romang Polong pada saat rekap PPS untuk TPS 06 terjadi perbedaan C1 yang sudah ditanda tangani oleh Petugas KPPS TPS 06 dengan C1 Plano. Pada C1 Plano tertulis 36 suara	Rekapitulasi Perolehan Suara	Tidak cukup unsur Pelanggaran Pidana Pemilu



NO	NOMOR & TGL LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN	TINDAK LANJUT
		sedangkan pada C1 yang diterima saksi Gerindra tertulis 1 suara. setelah klarifikasi dan penelusuran yang dilakukan oleh PPS ternyata sebagian besar C1 tertulis betul 36 bukan 1 sehingga yang dimasukkan dalam rekap PPS adalah angka 36.		
16	01/LP/PILE G/IV/2014 Tgl 12/4/2014	Pada proses penghitungan surat suara di TPS 7 Kanjilo Kecamatan Barombong, Ketua KPPS atas nama Sunandar diduga melakukan kecurangan pada saat menyebut perolehan suara yang dibacakan dengan menyebutkan nama caleg tertentu meskipun yang tercoblos adalah caleg lain. sehingga protes dilakukan oleh saksi yang merasa dirugikan dengan menuntut penghitungan ulang surat suara pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Barombong. dan hasilnya memang banyak perubahan.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Dilimpahkan ke Pengadilan
17	29/LP/PILE G/IV/2014 Tgl 26/4/2014	Anggota PPK Kecamatan Somba Opu atas nama Alimuddin Dg. Nyonri telah melakukan kecurangan yang menguntungkan Caleg Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Iriani Bakri dan suara Caleg Gerindra Nomor Urut 1 atas nama H. Hamli Halim, SE., MM. sebesar	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Diteruskan ke Kejaksaan

NO	NOMOR & TGL LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN	TINDAK LANJUT
		10 berkurang. kecurangan dilakukan pada saat penghitungan surat suara ulang kecamatan Somba Opu di Kantor KPU Gowa dengan menyatakan suara Caleg No. 2 sementara yang tercoblos adalah caleg No. 1 Gerindra.		

Sumber : *Data Panitia Pengawas Pemilu Kab. Gowa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.*

Data pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa sebagaimana tergambar pada tabel di atas menunjukkan betapa tidak efektifnya proses penegakan hukum pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Gowa. Berbagai factor penyebab kurangnya pelanggaran yang bisa dijerat dengan hukum pidana pemilu antara lain terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan dalam hal ini Panwas Pemilu dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan / pembuatan berita acara ketika laporan mereka diperifikasi oleh Panwas, atau saat

mereka diminta untuk menghadirkan bukti-bukti dari laporannya.<sup>28</sup>

Realitas tersebut menjadikan Panwas semakin kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum guna mewujudkan prinsip Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan nara sumber dari kalangan pemerhati Pemilu.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESEIMPULAN**

1. Efektifitas penegakan hukum pidana pemilu tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu; masalah profesionalisme aparat penegakan hukum yang terdiri Dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta budaya hukum masyarakat.
2. Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan terdahulu, belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu, belum profesional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengabaikan aturan yang ada atau dengan kata lain masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut saling berkaitan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu belum tertangani dengan baik dan maksimal.

## **B. SARAN**

Demokrasi konstitusional tercapai salah satunya dengan proses penegakan hukum pemilu yang baik. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penting untuk memberikan beberapa saran dalam upaya mengefektifkan penegakkan hukum pemilu kedepan :

1. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
2. Perbaiki sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.
3. Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, bawaslu dapat mengangkat penyidik dan penuntut umum

sementara. Penyidik dan penuntut umum dapat direkrut dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Atau menyerahkan pelanggaran tindak pidana pemilu ke kepolisian dengan catatan adanya peningkatan kapasitas kepolisian dalam masalah masalah kepemiluan dan dilakukan pada unit khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Dedi Mulyadi, 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Gradien Mediatama, 2008. *Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik*. Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Ni' matul Huda, 2010. *Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Topo Santoso, 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Jakarta :Kencana
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa
- Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency
- Topo Santoso, dkk., 2006, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, file:///C:/Users/user/Downloads/667-1417-1-PB.pdf

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 055/A/JA/VI/2008, No. Pol. : B/06/VI/2008, Nomor : 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009

**Sumber Internet :**

([www.bawaslu.go.id/pdf](http://www.bawaslu.go.id/pdf)). Diakses pada Pukul 18.29 tanggal 5 Agustus 2015 Pukul 18.15 wita.

([http://seputar\\_pengertian.blogspot.com](http://seputar_pengertian.blogspot.com)) diakses pada tanggal 5 Agustus 2015, Pukul 18.29 wita.



(http://wikipedia.org). diakses pada tanggal 6 Agustus 2015 Pukul 14.00 wita.

(www://bawaslu-kalbarprov.go.id), diakses pada tanggal 6 Agustus 2015, pukul 12.15 wita.

(www://16mb.com) diakses pada tanggal 7 Agustus 2015, Pukul 15.24 wita.

(www://wordpress.com), diakses pada tanggal 7 Agustus 2015, Pukul 19.19 wita

(www://portalgaruda.com), diakses pada tanggal 8 Agustus 2015, pukul 16.45 wita.